PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD AGUS FADJAR**
2. Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **739975**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/161 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 241 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/352 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 48.500.000

1. MOTOR, HONDA NF100L Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA NF11A1CM/T Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOBIL, CHEVROLET LUVKBD26 Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. ----

D. SURAT BERHARGA — Rp. ----

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**4.500.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**2.703.000.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**370.067.964**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.332.932.036**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.